

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat inflasi month to month (m to m) dan tingkat inflasi year to date (y to d) Banyuwangi bulan Januari 2024 mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,02%, sama dengan Jawa Timur juga mengalami deflasi sebesar -0,10%, namun Nasional tetap inflasi di angka 0,04%. Indeks Harga Konsumen (IHK) Banyuwangi sebesar 105,47. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan sehingga terjadi deflasi di Banyuwangi adalah karena adanya penurunan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, laptop/notebook, bensin, telur ayam ras, buncis, jeruk, sabun mandi, gula pasir dan cumi-cumi. Pada Januari 2024 Banyuwangi mengalami inflasi year on year (y on y) sebesar 2,44% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,47. Inflasi y on y Banyuwangi sebesar 2,44% tercatat lebih rendah dari y on y Jawa Timur (2,47%) maupun Nasional (2,57%). Sedangkan untuk komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y on y bulan Januari 2024, masih juga dipimpin oleh komoditas beras, disusul emas perhiasan, bawang putih, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, cabai merah, sepeda motor, labu siam/jipang, gula pasir dan ongkos jahit.
- b. Pada Februari 2024, secara m to m, Banyuwang mengalami inflasi sebesar 0,52% lebih tinggi dari Jawa Timur (0,49%) dan nasional (0,37%). Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,02. Beberapa komoditas yang patut diberikan atensi karena dominan memberikan andil/sumbangan inflasi di Banyuwangi adalah karena adanya kenaikan harga pada komoditas beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, tomat, minyak goreng, jeruk, wortel, kentang dan gula pasir.
- c. Pada Maret 2024, secara month to month (m to m), Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,56% lebih rendah dari Jawa Timur (0,64%) namun lebih tinggi dari nasional (0,52%). Indeks Harga Konsumen (IHK) Banyuwangi sebesar 106,61. Dari 11 Kota IHK di Jawa Timur semuanya mengalami peningkatan inflasi m to m secara signifikan dan Banyuwangi menjadi yang terendah. Beberapa komoditas yang patut diberikan atensi karena dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m to m di Banyuwangi adalah karena adanya kenaikan harga pada komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, beras, bawang putih, baju muslim pria, minyak goreng, udang basah, bawang merah dan tongkol diawetkan. Meskipun Inflasi m to m Banyuwangi relatif naik memasuki Bulan Suci Ramadhan di Bulan Maret 2024, namun inflasi y on y Banyuwangi sebesar 2,67% masih tercatat lebih rendah dari y on y Jawa Timur (3,04%) maupun Nasional (3,05%). Dari 11 Kota IHK di Jawa Timur, YoY tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep sebesar 4,68%. Inflasi YoY Banyuwangi menjadi terendah kedua di Jawa Timur setelah Jember (2,53%). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year (y on y) bulan Maret 2024, adalah komoditas beras, emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, sepeda motor, tomat, bawang putih, gula pasir, labu siam/jipang dan cabai merah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H nampaknya sudah mengungkit kenaikan beberapa komoditas strategis di Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024. Sejak bulan Januari 2024, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,66%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24%; kelompok kesehatan sebesar 3,33%; kelompok transportasi sebesar 2,06%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,33%; kelompok pendidikan sebesar 2,11%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,52%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,61%.

- b. Pada Februari 2024, komoditas beras masih mengalami inflasi *month-to-month*, yaitu sebesar 8,11% dengan andil sebesar 0,46%. Kenaikan harga beras merata dan sangat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Banyuwangi. Harga beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Medium Rp 15.000, sedangkan Premium Rp 17.000.
- c. Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2024 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,54 %. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, tomat, dan minyak goreng.
- d. Penyumbang utama inflasi bulan Februari 2024 secara y-on-y adalah:
 1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,65%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras.
 2. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,30%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
 3. Kelompok transportasi dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sepeda motor.
- e. Secara historis inflasi bulanan, pada Maret selalu terjadi inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; hingga memberikan andil signifikan. Pada Maret 2024, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,17% hingga menyumbang andil inflasi sebesar 1,62% yang merupakan andil terbesar di dibandingkan kelompok lainnya.
- f. Pada bulan Maret 2024, terjadi inflasi *m-to-m* sebesar 0,56 %, inflasi *y-on-y* sebesar 2,67 % dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,06 %. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,39%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, bawang putih, minyak goreng, udang basah, bawang merah dan tongkol di awetkan.
- g. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2024 secara y-on-y adalah:
 1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,62%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras.
 2. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,37%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
 3. Kelompok transportasi dengan andil 0,24%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sepeda motor.
- h. Memasuki HBKN Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1445 H, kenaikan beberapa komoditas strategis di Banyuwangi perlu adanya dukungan dari segenap SKPD yang tergabung di TPID Kabupaten Banyuwangi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun

a.

2024 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Dalam upaya menjaga dan mengendalikan harga bahan pokok, sejumlah upaya dilakukan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya adalah dengan membuat Toko Pengendalian Inflasi Banyuwangi (TOP Si Wangi). Top Si Wangi berfungsi sebagai toko penyeimbang untuk mengantisipasi inflasi dan lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pemkab bermitra dengan Bulog dan sejumlah toko sebagai mitra untuk menjadikan toko tersebut memiliki fungsi sebagai Top Si Wangi. Ini salah satu cara agar saat terjadi kenaikan harga, toko-toko ini bisa menjual bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini akan melengkapi operasi pasar keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UM Perdagangan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki tugas melakukan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, untuk mencegah terjadinya inflasi daerah. Salah satunya dengan melakukan langkah preventif yakni memastikan ketersediaan bahan pokok yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena itu TPID menggandeng mitra toko-toko milik warga sebagai solusi untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Pemkab Banyuwangi terus mendorong agar di setiap pasar ada Top Si Wangi. Toko-toko tersebut setiap harinya menyediakan bahan pokok dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Bulog dan beberapa Gapoktan Mitra menjadi pihak penyuplai bahan-bahan pokok tersebut. Ketika ada harga kebutuhan pokok tertentu yang melesat cukup tinggi, maka toko penyeimbang akan menjual barang yang naik itu dengan harga yang sudah disubsidi. Harapannya agar harga bisa kembali stabil dan terkendali. Berkat kekompakan stakeholder TPID dan dukungan semua mitra, pengendalian inflasi Banyuwangi selama 2023 bisa terjaga. Inflasi Banyuwangi *year on year* (YOY) 2023 menjadi yang terendah di Jatim yakni sebesar 2,15%. Lebih rendah dari YoY Jawa Timur (2,92%) maupun Nasional (2,61%). Bulog Cabang Banyuwangi menyuplai sejumlah bahan pokok ke 147 TOP Si Wangi yang tersebar di seluruh Kecamatan di Banyuwangi. Seperti beras, minyak goreng dan gula pasir. Harga yang dijual ke para pemilik toko merupakan harga distributor yang stabil sehingga harga jual ke konsumen juga bisa stabil, tidak fluktuatif. Harga jual beras SPHP Rp. 54.000 per lima kilogram, minyak goreng Rp. 13.500 per liter dan gula pasir Rp. 16.500. Setiap harinya Bulog mengirimkan bahan pokok ke toko-toko yang menjadi mitra. Bahan pokok yang disuplai sesuai dengan kebutuhan toko tersebut.
- b. Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Bulog menggelar operasi pasar sebagai respons naiknya harga beras. Tiap hari disediakan 10 ton beras medium SPHP, yang digelar di 25 kecamatan Banyuwangi secara bergiliran. Salah satunya adalah operasi pasar yang digelar di kawasan Pasar Banyuwangi tepatnya di depan Gedung Juang 45, Kecamatan Banyuwangi, dan Pasar Sempu, Kecamatan Sempu. Di Pasar Banyuwangi selain 3,5 ton beras, juga tersedia 400 kg gula pasir, 200 liter minyak, dan 40 kg tepung terigu juga dengan harga lebih murah dari pasaran. Ini merupakan inisiasi dan kolaborasi antara Bulog dan Pemkab Banyuwangi, guna menghadapi naiknya harga beras di pasaran. Semoga membantu warga untuk bisa membeli beras dengan harga yang terjangkau. Dalam operasi pasar tersebut beras kualitas medium dijual seharga Rp 51 ribu per kemasan 5 kilogram (kg), atau Rp 10.200 per kg. Di pasaran saat ini, harga beras tersebut telah menyentuh angka Rp 12 ribu lebih per kg. Di operasi pasar tersebut, tiap warga dibatasi membeli beras maksimal 2 kemasan atau 10 kg. Pembatasan pembelian tersebut untuk mengantisipasi penimbunan atau dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Selain beras warga juga bisa membeli bahan pokok lain

yang juga harganya lebih rendah dibanding harga pasaran. Mulai dari minyak goreng seharga Rp 14 ribu per kg, gula pasir Rp 15 ribu per kg, dan tepung terigu Rp 10 ribu per kg. Ratusan warga terlihat antusias membeli beras dan bahan pokok lain. Selisih harga yang relatif tinggi membuat mereka rela mengantre untuk ikut dalam operasi pasar. Kenaikan harga beras terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu penyebabnya jadwal tanam padi yang mundur dampak el nino. Hal tersebut otomatis membuat musim panen padi juga mundur. Luas tanam padi Banyuwangi berkurang di akhir tahun kemarin. Di perkiraan Maret minggu kedua beberapa petani sudah mulai panen. Dan mudah-mudahan sejalan dengan panennya petani, harga beras pun bisa ikut tertekan. Operasi pasar telah digelar sejak bulan Januari 2024. Operasi pasar berlangsung tiap hari di lokasi-lokasi yang berbeda agar bisa menyentuh seluruh wilayah kecamatan. Selain 10 ton beras yang digelontor setiap hari untuk operasi pasar, Bulog juga menyuplai beras ke pasar-pasar tradisional. Jika ditotal, per hari disalurkan sekitar 20 hingga 30 ton beras. Stok beras di Gudang Bulog Banyuwangi sebanyak 5.500 ton dan masih akan ada penambahan. Jumlah itu cukup untuk stok selama tiga bulan ke depan. Masyarakat menyambut antusias digelarnya operasi pasar. Karena mereka bisa mendapat bahan pangan utama itu dengan harga jauh lebih murah.

- c. Bupati bersama TPID Kabupaten Banyuwangi aktif turun langsung untuk memonitor ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di 14 pasar daerah di Banyuwangi. Pada beberapa kesempatan, kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan Gerakan belanja “cantik” di pasar rakyat dan UMKM yang dicetuskan Bupati Banyuwangi sejak tahun 2021 dan dilaksanakan di setiap tanggal dan bulan kembar, misalnya 1.1; 2.2; 3.3 dan seterusnya. Selain menggerakkan perekonomian warga, gerakan ini juga membantu warga yang membutuhkan karena hasil belanjanya langsung didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini menggambarkan sebuah kepedulian kolektif yang berdampak bagi masyarakat luas. Banyak masyarakat yang terbantu, tidak hanya masyarakat penerima bantuan saja namun para penjual di pasar serta pelaku UMKM juga menikmati keberkahan saat Gerakan ini dilaksanakan setiap bulannya. Total transaksi yang melibatkan ribuan ASN dan berbagai komunitas di Banyuwangi mampu mencatat total transaksi berkisar Rp700 juta-Rp900 juta per bulannya.
- d. Pemkab Banyuwangi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan bisa mengungkit daya beli dan menjaga keterjangkauan harga, terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung tidak hanya upaya pengendalian inflasi, namun juga program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat arus bawah. Korporasi yang memiliki anggaran CSR dikoordinasikan agar bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan. Salah satu contoh adalah bantuan gerobak bagi PKL dari BPR Jatim yang semakin melengkapi program-program pro UMKM di Banyuwangi. Salah satunya, program Warung Naik Kelas yang memberikan bantuan berupa dana maupun peralatan usaha kepada pelaku UMKM. Ini merupakan program stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro yang sudah dilaksanakan sejak 2021. Hingga saat ini, program Warung Naik Kelas telah menyentuh 1.186 warung di Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi juga melaksanakan program Ongkos Kirim Gratis bagi pelaku UMKM yang tahun ini ditargetkan menyasar 500 UMKM. Berbarengan dengan itu, juga dibuka fasilitasi pengurusan administrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) kepada para pelaku UMKM. Berbagai pelatihan dan pendampingan juga terus dilaksanakan. Pada tahun 2023 lalu 2.345 orang telah dilatih untuk berwirausaha sekaligus diberikan bantuan alat usaha penunjangnya.
- e. Pemkab Banyuwangi terus melakukan berbagai upaya untuk menaikkan kelas UMKM lokal. Salah satunya, dengan menggandeng perusahaan e-commerce untuk memperluas

jangkauan market UMKM melalui pemasaran online (digital marketing). UMKM didorong untuk memanfaatkan market place yang sudah ada di Indonesia. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dilaksanakan workshop perpajakan dan marketing online yang diikuti 250 pelaku UMKM yang merupakan pelaku langsung e-commerce dari PT. Shopee Indonesia. Kemampuan UMKM lokal harus terus di-up grade, mulai membantu pengemasan produk, meningkatkan kualitas produk, memfasilitasi sejumlah ijinnya, serta memperluas pasarnya. Dalam workshop tersebut, para pelaku UMKM juga mendapatkan berbagai materi terkait bisnis online oleh Shopee Indonesia. Mulai dari tata cara, prospek, ragam produk yang paling diminati, hingga keuntungan berbisnis online. Beberapa program untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro (UMKM Naik Kelas) akan terus dilanjutkan. Termasuk program Ongkir Gratis akan terus dilaksanakan di tahun ini.

- f. Untuk mengurangi beban pengeluaran dan menunjang tugas pelayanan bagi warga di wilayahnya, Pemkab Banyuwangi memberikan jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 13.457 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Banyuwangi. Mereka mendapatkan perlindungan dari resiko yang terjadi selama menjalankan tugasnya. Ini sebagai apresiasi kepada para RT/RW yang terus melakukan pelayanan kepada warganya. RT dan RW adalah organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga yang paling memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Diharapkan juga agar para RT/RW ini membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan serta mengecek mana warga miskin yang layak dapat bantuan untuk segera dilaporkan ke desa atau kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk program jaminan perlindungan sosial bagi ketua RT/RW ini mencapai Rp 2,3 Miliar. BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki banyak manfaat. Seperti keselamatan kerja dan jaminan kematian. Ini adalah bentuk perlindungan dan penghargaan yang kami berikan kepada para ketua RT/RW, yang telah bekerja memberikan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi. Para Ketua RT/RW di Banyuwangi, selain diberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan insentif kinerja setiap bulannya yang disalurkan lewat anggaran desa.
- g. Pemkab Banyuwangi menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi masalah penting dalam mengatasi beragam masalah sosial. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi melalui Gerakan "ASN Berbagi" menggalang partisipasi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong membantu warga miskin dengan cara menjadi "orang tua asuh". Dalam gerakan ini, setiap ASN ditentukan akan mengasuh sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data *by name by address* pada aplikasi Smart Kampung-nya masing-masing. Ini adalah bagian dari upaya menggugah kepedulian ASN terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. ASN diajak turun untuk berempati kepada warga miskin dan membantu penanganannya. Gerakan ASN Berbagi ini merupakan lanjutan dari gerakan Hari Belanja yang rutin dilakukan oleh ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta di Banyuwangi yang bergulir sejak tahun 2021, di setiap tanggal cantik tiap bulannya. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN. Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri saat ini tercatat 7,34 persen. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi. Dalam program ASB Berbagi, para ASN juga diwajibkan untuk memonitor kondisi keluarga yang diasuh. Misalnya bagaimana kondisi mereka apakah sebatangkara, bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada anak usia sekolah yang putus sekolah, apakah sudah menerima bantuan rutin dari pemerintah, bagaimana kondisi rumahnya, dan sebagainya.

Ini juga wajib jadi perhatian dan harus dilaporkan melalui aplikasi Smart Kampung.

- h. Pemkab Banyuwangi melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mendukung penguatan ekonomi warga. Baznas Banyuwangi memberikan dukungan berupa dana bergulir modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Pada tahun 2024 ini, dikucurkan dana sebesar Rp. 500 juta untuk penguatan usaha para pelaku mikro. Sangat disadari jika butuh keterlibatan banyak pihak untuk mendorong perekonomian daerah. Untuk itu kami mengajak pihak lain berkolaborasi, salah satunya adalah Baznas. Pada tahun 2024 ini bantuan akan disalurkan kepada 300 usaha mikro. Skemanya sangat membantu pelaku usaha mikro. Tanpa syarat administrasi, cicilannya sangat ringan, apalagi ada dana hibah setelah tahap ketiga. Bantuan yang disalurkan Baznas merupakan bantuan dana bergulir yang akan berlangsung dalam tiga tahap. Bantuan tahap pertama sebesar Rp. 750 ribu per pelaku usaha mikro. Setelah modal pertama tersebut lunas, maka akan langsung mendapat dana bergulir tahap dua senilai Rp. 1 juta. Setelah yang kedua dilunasi, mereka bisa mendapatkan bantuan ke-tiga sebesar Rp. 1,5 juta. Pengembalian modal itu dicicil setiap hari dengan nominal minimal Rp. 10 ribu tanpa adanya bunga, hingga jangka tiga bulan. Setelah lunas tahap ke-tiga, maka pelaku usaha akan mendapatkan hibah modal sebesar Rp. 1,5 juta yang tidak perlu dikembalikan lagi. Program dana bergulir modal usaha Baznas sudah berlangsung sejak 2022. Pada tahun 2024 ini jumlah penerima yang akan mendapatkan sebanyak 300 pelaku usaha mikro. Selain bantuan dana bergulir, Baznas juga menyiapkan bantuan modal usaha yang diberikan secara insidental ketika ada yang membutuhkan, serta ada juga bantuan peralatan usaha seperti becak untuk penyandang disabilitas.
- i. Pemkab Banyuwangi kembali menggelar program kursus gratis bagi warganya dalam program Banyuwangi Ayo Kursus, yang memfasilitasi beragam pelatihan keterampilan. Kali ini sekitar 600 orang mengikuti program yang digelar untuk membantu warga, untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha secara mandiri. Setidaknya ada 14 jenis kursus yang ditawarkan mencakup berbagai bidang. Seperti, barista, pangkas rambut, bahasa asing, pariwisata dan perhotelan, tata rias pengantin, tata boga, tata busana, hingga pelatihan berbasis digital seperti bahasa pemrograman, content creator, desain grafis, dan digital marketing. Ini merupakan usaha Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan vokasional. Selain itu juga memberikan *life skill* berupa *soft skill* dan *hard skill* yang nanti bisa menjadi bekal mereka dalam memasuki dunia kerja atau bekal berwirausaha secara mandiri. Program yang telah memasuki tahun ketiga ini adalah inisiatif pelatihan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga Banyuwangi. program ini diharapkan dapat membantu warga Banyuwangi untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan berdikari secara ekonomi. Pemkab Banyuwangi setiap tahunnya menggelar berbagai program peningkatan kemampuan bisnis, keterampilan hingga memberikan modal usaha sampai ratusan juta rupiah. Di antaranya model inkubasi bisnis bagi pengusaha muda melalui program Jagoan Banyuwangi, bantuan alat usaha melalui program Warung Naik Kelas (Wenak), dan pelatihan keterampilan lainnya. Program ini menyediakan 47 kelas yang tersebar di beberapa lokasi se-Banyuwangi. Pemkab juga menggandeng 6 SMK, dan 25 lembaga kursus pelatihan di Banyuwangi. Pola pengajarannya adalah *project based learning*. Jadi outputnya, para peserta pelatihan diharuskan menghasilkan karya yang nantinya akan dinilai oleh para pengajar. Selain itu, para warga belajar juga akan mendapatkan pendampingan produk industri rumahan, sertifikasi halal, dan pelatihan digital marketing termasuk desain kemasan produk, dan lainnya. Dengan pendampingan ini diharapkan, para peserta bukan hanya bisa memulai karir atau usahanya, tapi juga bagaimana mempertahankan usahanya agar *sustainable*.

Berbagai program pengentasan kemiskinan terus digencarkan Pemkab Banyuwangi.

j.

Salah satunya, pengentasan kemiskinan dengan instrumen program padat karya. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera. Program itu dilakukan dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan yang menargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi. Program ini akan diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya. Tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin.

- k. Untuk menjaga daya beli masyarakat melalui cara pengurangan beban biaya, Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan sejumlah program khusus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Ada tujuh program yang disasarkan bagi pelajar kurang mampu tersebut. Antara lain bantuan biaya hidup pelajar tidak mampu, Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah), bantuan uang transport siswa tidak mampu, beasiswa kuliah Banyuwangi Cerdas, bantuan alat pembelajaran, serta bantuan uang saku. Program yang telah dirintis sejak 2017 ini akan terus dilaksanakan karena melihat manfaatnya yang besar. Pada program uang saku, pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari. Demikian pula bantuan uang transportasi, para pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari, dan SMA Rp20.000 per hari. Program ini bisa membantu para pelajar kurang mampu untuk semakin giat bersekolah. Uang saku yang diberikan tiap hari digunakan untuk membeli makanan, sehingga dia belajar dengan perut terisi dan gizi cukup, yang bisa menstimulasi otak dalam menerima materi pembelajaran. Pada tahun 2024, ketujuh program untuk menopang pendidikan pelajar tidak mampu akan terus digencarkan. Bantuan biaya hidup (personalia) diberikan kepada 840 siswa tidak mampu, Garda Ampuh disasarkan bagi 975 siswa, bantuan uang transport juga diberikan kepada 600 siswa tidak mampu, juga bantuan alat pembelajaran untuk siswa miskin senilai Rp 1,2 miliar. Bantuan uang saku diberikan kepada 564 orang, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi bagi pelajar kurang mampu dialokasikan untuk 80 orang. Banyuwangi juga menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa peserta program Banyuwangi Cerdas sebanyak 300 orang. Untuk bantuan uang saku kepada anak-anak kami di SDN 8 tadi sebesar Rp 3,2 juta per tahunnya. Kalau untuk siswa SMP Rp 4,4 juta, sementara SMA sederajat Rp 5,7 juta. Program-program tersebut, saling mendukung dengan program lainnya. Seperti program Siswa Asuh Sebaya (SAS) dimana para pelajar saling membantu di antara mereka dengan menyisihkan uang jajannya. Setiap pekan, siswa yang uang jajannya lebih menyisihkan sebagian untuk dikumpulkan ke bendahara kelas. Uang yang terkumpul akan diberikan ke siswa kurang mampu berupa uang atau barang yang mereka butuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah siswa. Program SAS ini, kini berkembang menjadi Sekolah Asuh Sekolah. Di mana sekolah yang memiliki kelebihan dana SAS akan diberikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan bantuan untuk siswanya yang kurang mampu.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemkab Banyuwangi melibatkan dinas-dinas teknis yang bergerak di sektor hulu, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan yang berperan menjamin

ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu inflasi.

- b. Pemkab Banyuwangi menerapkan pertanian yang presisi untuk mengatasi berkurangnya kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan layanan uji tanah untuk pemupukan tepat dosis berbasis internet of things (IoT) yang bisa dimanfaatkan oleh petani setempat. Layanan uji kualitas tanah tersebut menggunakan alat uji tanah, Jinawi. Jinawi merupakan sistem pintar rekomendasi pemupukan berbasis IoT. Dengan alat ini mampu melihat kualitas unsur hara makro di dalam tanah secara cepat dan real time, seperti unsur Nitrogen (N), fosfor (P), Kalium (K), serta pH tanah. Alat ini bisa dimanfaatkan petani untuk mengetahui berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan. Dengan uji tanah ini petani bisa mengetahui kebutuhan pupuk secara tepat sesuai kebutuhan, sehingga pupuk yang digunakan tidak berlebihan. Dengan demikian kuota pupuk subsidi bisa digunakan secara optimal. Dengan diketahuinya kualitas tanah tersebut, dapat ditentukan rekomendasi pemupukan yang sesuai (presisi). Dengan tahu berapa pupuk yang dibutuhkan, diharapkan produktivitas tanaman dapat ditingkatkan. Petani bisa memanfaatkan layanan uji lahan ini sehingga tahu berapa kebutuhan pupuk yang dibutuhkan, agar tidak membeli pupuk berlebihan, cukup sesuai kebutuhan. Layanan ini bisa diakses petani di Banyuwangi tanpa dipungut biaya. Petani cukup datang ke kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk mengajukan layanan. Cara penggunaan alat uji tanah ini dengan ditancapkan ke tanah. Setelah itu muncul hasil analisa kondisi tanah serta rekomendasi pupuk utama yang diperlukan. Layanan ini adalah upaya untuk menjaga kualitas tanah. Berdasarkan data dinas pertanian, rata-rata kesuburan tanah di Banyuwangi mulai menurun dengan kadar karbon organik berada di bawah 2 persen. Salah satunya disebabkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam waktu lama. Petani terus didorong untuk beralih ke pertanian organik. Selain lebih ramah lingkungan, produk hasil pertanian organik memiliki daya jual tinggi. Untuk mendukung pertanian organik, Pemkab Banyuwangi telah melakukan berbagai program, di antaranya mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, agen hayati, demplot pertanian organik, hingga memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani. Hingga saat ini pupuk organik cair yang telah dibagikan mencapai 466.636 liter. Jumlah ini bisa mengcover lahan seluas 83.524 ha.
- c. Permasalahan yang terjadi di daerah terkait Distribusi pupuk bersubsidi antara lain adalah: Kios sebagai penyalur pupuk bersubsidi yang ditunjuk tidak mampu menyediakan pupuk karena terbatasnya modal usaha, Petani memiliki keterbatasan biaya untuk menebus pupuk bersubsidi, Penebusan pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), Adanya pungutan liar dalam menebus pupuk distribusi di tingkat petani, Pupuk diperjualbelikan kepada yang tidak berhak dan Tingginya angka Penolakan pada sistem eVerval oleh Tim Verval Pupuk Bersubsidi karena kesalahan administrasi pada proses penebusan kios. Selanjutnya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan yang terjadi terkait Distribusi pupuk bersubsidi mengambil Langkah sebagai berikut: Pertemuan KP3 tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan, Pembinaan Distributor dan Kios Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pembinaan Tim Verval Pupuk Bersubsidi dan Koordinasi terkait Pupuk bersubsidi dengan Kementerian dan Provinsi. Pemkab Banyuwangi menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Pusat terkait Pendistribusian Pupuk bersubsidi, yaitu: Proses Verifikasi dan Validasi dilakukan secara langsung pada sistem eVerval saat pendistribusian pupuk subsidi, Data pada sistem iPubers harus sama dengan alokasi sesuai SK Bupati, Ketersediaan pupuk subsidi di kios diharapkan sesuai dengan kebutuhan petani saat pemupukan. Bupati Banyuwangi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 500/257/429.021/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 agar distribusinya berjalan lancar hingga bisa dimanfaatkan oleh

para petani untuk menunjang peningkatan produksi tanaman pangannya.

- d. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan daging dan susu, Pemkab Banyuwangi terus mendorong kemajuan sektor peternakan di Banyuwangi. Salah satunya seorang peternak bernama Antok di Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro yang berhasil mengangkat ekonomi warga melalui budidaya kambing perah. Ia merangkul puluhan orang untuk membudidayakan kambing dengan sistem gotong royong. Dengan merangkul warga Telemung dan sekitarnya, ia berhasil membudidayakan kambing dari awalnya 10 ekor menjadi sekitar 600-an ekor. Peternakan kambing perah Avatar Farm yang berkonsep pembudidayaan masyarakat berhasil mengerek perekonomian banyak warga di desa Telemung. Wilayah Kecamatan Kalipuro merupakan salah satu sentra kambing perah di Banyuwangi dengan populasi sebanyak 20 ribu ekor. Untuk wilayah Desa Telemung, populasinya sekitar 6 ribu ekor. Dengan total produksi susu rata-rata 2 ribu liter per hari. Selain dihuni banyak kambing perah, Desa Telemung juga menjadi salah satu sentra perkebunan kopi, manggis, dan durian sehingga dunia peternakan dan pertanian bisa saling berkolaborasi saling berkelanjutan.
- e. Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu), karena selain berfungsi menjaga daerah aliran sungai (DAS), program yang masuk TOP 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur tahun 2023 tersebut, juga diperluas ke sektor wisata. Sekardadu merupakan program kolaboratif yang melibatkan lintas sektoral termasuk pelajar dari semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan pondok pesantren, untuk bersama-sama merawat kebersihan sungai yang ada di sekitar lingkungannya. Tujuan dari program ini masih sama, menjaga dan merawat kebersihan sungai. Mulai daerah tangkapan air mulai hulu hingga hilir. Sekardadu mendorong kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam, agar ekosistem terjaga dengan baik dan ketersediaan air selalu terjaga. Selain merawat aliran sungai melalui program Sekardadu, diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Seperti di kawasan aliran sungai Jopuro yang menjadi destinasi wisata air. Wisata Jopuro memanfaatkan sumber mata air Sumber Mengarang, yang berfungsi sebagai perairan sawah dan sumber air bersih untuk HIPAM. Jopuro memiliki saluran irigasi yang airnya jernih dan dimanfaatkan masyarakat menjadi destinasi wisata pemandian alami dengan lanskap yang sejuk dan asri. Jopuro juga dijadikan lokasi edu-ekowisata alam yang dapat memberikan edukasi kepada anak-anak maupun Masyarakat sekitar tentang keanekaragaman hayati. Jopuro dapat menjadi pilot plan Pembangunan destinasi wisata sumber daya air, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam. Sekardadu melibatkan hingga 141 Sekolah mulai SD hingga perguruan tinggi, dengan jumlah kader 272.780 siswa. Panjang aliran sungai yang dirawat mencapai 35 ribu meter. Program ini mengedukasi para pelajar dan mahasiswa secara aktif bagaimana menjaga kebersihan sungai dan lingkungannya. Mereka diangkat sebagai “Duta Sekardadu” dan bertugas mengajak teman maupun masyarakat untuk bersama-sama merawat daerah aliran sungai (das) di lingkungannya. Di program Sekardadu juga melibatkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti bersih sungai, menanam tanaman di pinggir sungai, serta penyebaran bibit ikan yang ikut menjaga ekosistem sungai. Kini Sekardadu menargetkan memperluas radius menjadi 2 km dari sungai atau saluran, sehingga lebih banyak lembaga pendidikan terlibat. Tahun 2024, Sekardadu juga akan menerapkan mekanisme monitoring melalui sistem aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan keaktifan lembaga pendidikan dalam menjalankan program. Dengan demikian memudahkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- f. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Banyuwangi dengan optimalisasi produksi, pengelolaan cadangan pangan

dan penganeekaragaman pangan.

- g. Bupati bersama TPID Banyuwangi memastikan selama Ramadhan hingga Idul Fitri, stok berbagai kebutuhan pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi dalam status aman dengan melakukan pengecekan langsung ke Depo Pertamina Tanjung Wangi, dan Gudang Bulog. Mulai ketersediaan bahan pangan, bahan bakar gas elpiji, hingga bahan bakar minyak (BBM) berada dalam jumlah yang mencukupi. Dengan stok yang cukup, diharapkan tidak sampai terjadi kenaikan harga. Ketersediaan elpiji di pasaran untuk saat ini masih berlimpah meskipun diperkirakan akan ada peningkatan permintaan saat puasa dan lebaran, namun jumlah stok tersebut masih sangat mencukupi. Untuk BBM, ada peningkatan kuota pada jenis pertalite sebesar 11 persen dari total realisasi tahun sebelumnya. Dengan perkiraan terjadi kenaikan jumlah kendaraan sebesar 5-10 persen, kuota pertalite tersebut tidak akan mengganggu penjualan di SPBU. Demikian juga dengan biosolar yang diprediksi tidak akan mengalami defisit stok selama Ramadhan dan lebaran. Agar solar subsidi tepat sasaran, diberlakukan sesuai aturan nasional. Setiap calon pembeli harus mendaftar melalui website pertamina sebagai syarat memenuhi kriteria pembelian di SPBU. Saat meninjau gudang Bulog di Ketapang untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan, mulai beras, gula, minyak goreng, hingga tepung ditemukan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 200 ton. Stok ini akan terus bertambah karena sudah memasuki musim panen, sehingga dipastikan aman sampai beberapa bulan ke depan. Sejak awal Maret Bulog sudah melakukan penyerapan beras dari petani. Ditargetkan dalam tahun 2024 bisa menyerap hingga 40.500 ton beras. BULOG optimis bisa tercapai karena Banyuwangi merupakan produsen beras. Stok komoditas pangan yang lain seperti gula pasir di gudang Bulog masih tersedia sebanyak 20 ton. Dalam waktu dekat, Bulog akan mendatangkan lagi 150 ton gula pasir. BULOG juga akan mendatangkan tepung dan minyak goreng 120.000 liter sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pasokan. BULOG bersama Pemkab juga sudah melakukan operasi pasar sejak awal 2024 di berbagai titik se-Banyuwangi. Operasi Pasar akan terus digelar selama harga bahan pokok di pasaran masih di atas HET. Ini dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi di Banyuwangi.
- h. Bupati Banyuwangi memastikan stok cabai dan bawang merah menjelang selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri dipastikan aman karena sudah melakukan monitoring ke beberapa sentra penanaman cabai dan bawang merah untuk memastikan ketersediaan stoknya. Di antaranya, sentra penanaman cabai merah besar di Desa Tamanagung, Kecamatan Cluring. Sentra penanaman cabai rawit dan bawang merah di Desa Sumbersewu dan Tembokrejo, Kecamatan Muncar; serta Desa Bimorejo dan Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo. Alhamdulillah sejauh ini stok aman. Terlebih Maret-April sudah memasuki musim panen. Panen pada periode tersebut cukup untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Banyuwangi, selama bulan Ramadhan hingga Lebaran 2024. Diperkirakan saat panen, produksi cabai rawit mencapai 10.518 ton, cabai merah besar 1.425 ton, dan bawang merah 870 ton. Sementara rata-rata kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi untuk komoditas cabai rawit sebanyak 272 ton per bulan, cabai merah besar 323 ton per bulan, dan bawang merah 383 ton per bulan. Artinya stok cabai dan bawang merah Banyuwangi masih surplus. Dengan pasokan yang terus terjaga, diharapkan harga komoditas cabai dan bawang merah bisa tetap stabil. Selain dua komoditas tersebut, stok komoditas pangan yang lain juga dalam status aman. Berdasarkan data neraca pangan pokok tahun 2023, ketersediaan beras Banyuwangi sebesar 424.987 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya sebesar 165.411 ton, atau terjadi surplus beras sebesar 259.576 ton. Kondisi surplus juga terjadi pada komoditas jagung sebesar 195.171 ton, daging sapi 70,39 ton, daging ayam ras 1.102 ton.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah sentra cabai nasional. Karena itu

i.

Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus memacu pengembangan komoditas cabai. Ini juga menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi, mengingat cabai rawit merupakan salah satu komoditas yang berkontribusi besar terhadap pergerakan harga pasar. Untuk mendukung hal tersebut, pemkab menggulirkan berbagai kebijakan guna memacu pengembangan komoditas cabai rawit di Banyuwangi. Mulai menggelar sekolah lapang, memberikan bantuan pupuk organik, menyediakan bangsal kemas/ packing house, hingga menyiapkan pasar lelang untuk mendukung pemasaran produknya. Programnya dari hulu ke hilir. Kita berikan bantuan pupuk organik untuk menunjang kesuburan lahan sebelum masa tanam, hingga bagaimana penanganan pasca panennya. Dengan berbagai program ini, diharapkan produksi cabai Banyuwangi terus terjaga. Di Banyuwangi terdapat kawasan yang menjadi sentra pembudidaya cabai terdapat di berbagai kecamatan. Salah satunya Kecamatan Wongsorejo dengan luas tanam mencapai 12.710 hektare, atau mencapai 34,9 persen dari total lahan tanam cabai rawit se-Banyuwangi. Produktivitas cabai rawit wilayah ini rata-rata mencapai 8-10 ton/hektare, lebih tinggi dari rata-rata Banyuwangi sebesar 5-7 ton/hektare. Masyarakat di Wongsorejo, terbiasa menanam cabai rawit secara tumpang sari dengan tanaman jagung. Biasanya cabai ditanam setelah tanaman jagung berusia dua bulan. Tak heran, jagung juga menjadi komoditas unggulan di daerah ini, selain cabai rawit. Selain Wongsorejo, di Banyuwangi juga terdapat sejumlah sentra cabai rawit lain, di antaranya Kecamatan sempu dengan luas tanam 5.468 hektare, dan Kecamatan Cluring dengan luas tanam 3.945 hektare. Dengan seluruh lahan tanam tersebut, pada tahun 2023 produksi cabai Banyuwangi mencapai 257.418 ton. Selain cabai rawit, Banyuwangi juga memiliki sejumlah sentra cabai besar. Di antaranya Kecamatan Licin, Kalibaru, dan Tegalsari. Dinas Pertanian dan Pangan guna mendukung pengembangan cabai rawit juga memberikan bantuan pupuk organik dan pengendalian hama penyakit. Kedua program ini dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas cabai rawit. Ada juga bantuan sarana pengolahan dan pemasaran berupa fasilitas pasar lelang dan *packing house*/bangsal kemas. Bangsal kemas bisa dimanfaatkan petani untuk menyimpan sementara hingga melakukan penanganan pasca panen sebelum cabai siap dipasarkan. Se-Banyuwangi ada 10 bangsal kemas yang disiapkan di wilayah-wilayah sentra cabai. Di antaranya di Wongsorejo, Kalipuro, dan Srono. Dinas Pertanian dan Pangan juga rutin menggelar sekolah lapang. Kegiatan ini memberikan pembekalan kepada petani tentang tata cara budidaya yang baik (*Good Agricultural Practises/GAP*), misalnya prosedur pengolahan tanah yang tepat, pemilihan bibit, pemberian pupuk, hingga cara pengendalian hama penyakit. Sekolah lapang ini rutin digelar sebelum memasuki masa tanam. Kegiatan ini untuk menambah skill dan pengetahuan petani sejak persiapan masa tanam hingga penanganan pasca panen yang tepat, sehingga mutu dan daya saing produk tetap terjamin. Tak hanya itu, di sekolah lapang petani juga diajarkan tentang penanganan pasca panen (*Good Handling Practices/GHP*).

j. Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk sebagai penyangga komoditas cabai rawit secara nasional oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas tersebut pada masa mendatang. Banyuwangi salah satu di antara tiga daerah yang ditunjuk menjadi penyangga komoditas cabai secara nasional, selain Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, keduanya di Jawa Barat. Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektar untuk program penanaman cabai tersebut. Rencananya, penanaman cabai untuk menyangga kebutuhan nasional dimulai pada Agustus dan September 2024. Tujuannya, agar saat terjadi lonjakan harga di masa mendatang, pemerintah sudah memiliki stok cabai rawit untuk kegiatan operasi pasar

murah. Banyuwangi selama ini memang dikenal sebagai penyuplai kebutuhan cabai rawit untuk sejumlah daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek. Hanya saja, pada awal 2024 produksi cabai rawit mengalami penurunan signifikan karena intensitas hujan tinggi sejak akhir 2023. Hal ini, karena tanaman cabai rawit banyak yang rusak lantaran terserang penyakit yang biasa datang saat musim hujan. Akibatnya, harganya meroket tinggi di atas angka Rp100 ribu per kilogram. Tanaman cabai mulai belajar berbuah usia tiga sampai empat bulan. Kalau kondisi normal bisa 20 kali petik. Bisa bertahan delapan sampai 10 bulan. Namun karena intensitas hujan tinggi, risiko serangan hama penyakit juga semakin tinggi, seperti penyakit cacar dan sebagainya.

- k. Untuk meningkatkan suplai dan produksi pertanian utamanya sektor penyumbang inflasi seperti bawang merah dan cabai, Pemkab Banyuwangi meng-*upgrade* kapasitas dan skill petani dengan sekolah lapang. Dalam program ini, petani dibekali tentang tata cara budidaya yang baik (Good Agricultural Practises/GAP), mulai prosedur pengolahan tanah, pemilihan bibit, irigasi, pemberian pupuk, hingga cara pengendalian hama penyakit. Petani juga diajarkan tentang proses panen hingga penanganan pasca panen yang tepat (Good Handling Practices/GHP). Teknologi budidaya selalu berkembang. Maka kapasitas dan skill para petani harus selalu di *upgrade* agar produksinya bisa lebih optimal. Salah satunya, melalui program sekolah lapang. Sekolah Lapang Petani bawang merah dan cabai dimulai saat musim tanam (Maret). Untuk bawang merah dilaksanakan di Kecamatan Muncar dan Wongsorejo. Dua wilayah tersebut merupakan sentra produksi komoditas bawang merah di Kabupaten Banyuwangi. Sementara cabai rawit dilaksanakan di beberapa lokasi di antaranya Kecamatan Glagah, Licin, Singojuruh, dan Wongsorejo. Untuk cabai besar dilaksanakan di Kalibaru dan Glenmore. Sekolah lapang ini tidak hanya memberikan teori, tapi juga praktik langsung di lapangan. Dinas Pertanian dan pangan memberikan pendampingan budidaya hingga support sarana produksinya. Petani akan didampingi dari awal hingga akhir, sejak tahap penyiapan lahan hingga pasca panen oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Diharapkan program peningkatan kapasitas petani ini bisa memacu produksi bawang merah di Banyuwangi. Pada 2022 produktivitas bawang merah Banyuwangi mencapai 11,6 ton per hektar. Adapun total produksinya mencapai 6.902 ton. Jumlah tersebut diperoleh dari total luas tanam 1.176 hektar. Diharapkan tahun ini produktivitas bawang merah kita bisa meningkat minimal 4 kwintal per hektar, sehingga menjadi 12 ton per hektar. Dengan demikian supply bawang merah Banyuwangi bisa terus terjaga. Sementara produktivitas cabai rawit pada 2022 sebesar 84 kwintal per hektare, dengan total produksi 30.169 ton dari total luas panen 3.792 hektare. Untuk cabai merah besar, produktivitas di angka 125 kwintal per hektare. Adapun total produksinya 14.227 ton. Sejauh ini stok pasokan masih aman. Supply dan demand untuk bawang merah dan cabai lokal masih mencukupi. Namun Banyuwangi tetap siaga karena komoditas ini merupakan salah satu penyumbang inflasi.
- l. Dalam rangka stabilitasi ekonomi dan perannya mendukung kebijakan ekonomi nasional menuju kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Banyuwangi berusaha mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 dalam mendukung pengendalian inflasi memberikan bantuan berupa bibit tanaman hortikultura berupa bibit cabai rawit, bibit terong dan bibit tomat masing-masing sebanyak 2.220 batang yang tersebar di 20 (dua puluh) BPP se Kabupaten Banyuwangi dengan total bibit tanaman hortikultura sebanyak 132.000 batang atau seluas 3,5 Ha. Salah satu komoditas pengendali inflasi yaitu cabai rawit dengan total bibit tanaman sebanyak 44.400 batang atau setara 1,5 ha. Tujuan diberikan bantuan bibit tanaman hortikultura agar masyarakat penerima bantuan dapat belajar merawat tanaman, merasa memiliki, dan

akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman dan masyarakat menjadi makmur, sehat dan sejahtera sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Selain itu pasokan cabai rawit Banyuwangi sebagai komoditas penyumbang (inflasi) dapat terjaga karena berkontribusi besar terhadap pergerakan harga pasar.

- m. Pemkab Banyuwangi terus mendorong petani di Banyuwangi agar tidak terlalu bergantung pada pupuk bersubsidi. Sebagai contoh adalah Kelompok tani Sumber Urip, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, berangsur lepas dari ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi. Mereka secara swadaya mengoptimalkan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak ternaknya. Pengolahan pupuk organik ini dilakukan di peternakan sapi milik Saidi, ketua Kelompok Tani Sumber Urip. Tiap hari di kandang sapi yang menjadi Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) tersebut, kelompok tani ini mampu mengolah satu ton pupuk organik. Meskipun menjadi tempat pengolahan pupuk organik yang bahannya dari limbah ternak, ternyata tidak berbau. Pupuk organik sebagai salah satu upaya agar petani mulai beralih ke pertanian organik yang selain lebih ramah lingkungan juga memiliki prospek pasar yang lebih bagus. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pendampingan agar semakin banyak petani yang beralih ke pupuk organik. Apalagi jatah petani untuk pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat kian lama kian berkurang, sehingga pupuk organik bisa menjadi alternatif. Diharapkan para petani perlahan mulai beralih ke pupuk organik. Meskipun tidak bisa lepas sepenuhnya, tapi perlahan akan terus diarahkan agar beralih ke pupuk organik. Kelompok ini mengolah kotoran sapi yang dicampurkan dengan cocopeat dan dapat menghasilkan 1 ton pupuk setiap harinya. Cocopeat sendiri sangat mudah didapat karena bahan utamanya adalah sekam atau tempurung buah kelapa yang diolah atau dihaluskan hingga menjadi butiran seperti serbuk kayu, yang produk akhirnya adalah cocopeat. Pembuatan pupuk organik sangat mudah dan murah. Satu ekor menghasilkan sekitar 20 kg kotoran sapi. Untuk proses pembuatan dari kotoran menjadi pupuk sekitar 15 hari. Kini mereka bisa menghasilkan rata-rata 1 ton pupuk organik tiap hari. Kotoran sapi merupakan penghasil asam humat alami yang dapat meningkatkan Ph tanah secara optimal. Asam humat berfungsi meningkatkan porositas tanah mengikat oksigen, hingga menahan air lebih baik. Dengan menggunakan pupuk organik ini dapat menyeimbangkan Ph tanah dengan asam humat secara alami. Harapannya, produksi tanaman juga meningkat karena kesuburan tanahnya meningkat. Berkat penggunaan pupuk organik tersebut, beras hasil kelompok tani Sumber Urip mendapat sertifikat organik untuk ruang lingkup padi, dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (Lesos). Beras organik tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan Sistem Pertanian Organik melalui Internal Control System (ICS). Beras organik memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada beras umumnya. Satu kilogram untuk beras putih organik dihargai Rp 15.000, dan untuk beras merah organik dengan harga Rp 25.000.
- n. Selain soal pupuk, hal lain yang juga diperhatikan dalam pengembangan pertanian, yaitu masalah pasokan sumberdaya air. Itulah yang membuat Pemkab Banyuwangi juga gencar membangun Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di desa-desa. Sistem irigasi ini sangat penting karena untuk mengatur air dari ke hulu agar rata ke irigasi kawasan pertanian. JIT sangat penting karena akan berdampak pada meningkatnya produktivitas pertanian. Efek yang langsung dirasakan petani yakni adanya penambahan indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun, menjadi dua kali atau lebih. Bupati juga menginstruksikan kepada SKPD terkait untuk lebih ketat mengawasi lahan pertanian agar tidak berubah.
- o. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian Pemkab. Banyuwangi dengan terus mendorong warga untuk mengembangkan pertanian organik yang memanfaatkan pekarangan atau lahan. Pertanian organik merupakan sistem budidaya pertanian yang

mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pangan bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan dan pendapatan, karena menjadi kebutuhan paling mendasar setiap orang. Proses penanaman dilakukan secara organik menggunakan pupuk organik. Dengan program seperti ini, bisa menjadi kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kegiatan kebun bibit, demplot, pertanaman, pasca panen, serta pemasaran. Program semacam ini bisa dijadikan program desa karena hasilnya jelas, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, dan menambah ekonomi rumah tangga. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong untuk melakukan pembudidayaan tanaman dengan cara memanfaatkan lahan atau pekarangan. Diversifikasi tanaman semacam itu bisa meningkatkan ketahanan pangan warga.

- p. Pemkab Banyuwangi membangun Smart Green House (SGH) cabai rawit sebanyak 14 SGH di beberapa kecamatan di Banyuwangi. SGH menjadi tempat pembibitan dan perawatan cabai, dan tanaman sayuran dalam polibag hingga berbuah. Bibit yang dihasilkan didistribusikan pada Poktan, KWT (Kelompok Wanita Tani), TP PKK, Dasa Wisma dan Pokmas lainnya, sehingga diharapkan saat harga cabai rawit meroket, tidak akan terlalu berdampak bagi mereka. Ini merupakan salah satu *exit strategy* untukantisipasi kenaikan harga cabai rawit. Petani sebenarnya dalam keadaan normal bisa memperoleh keuntungan dari harga jual Rp 20 ribu per kilogram. Namun karena kondisi cuaca saat ini tidak normal, maka sangat mempengaruhi produksi sehingga menyebabkan harga yang melambung tinggi. SHG menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk mempertahankan kualitas dan produksi cabai di Banyuwangi tetap unggul. SGH bertujuan untuk mengintensifkan perawatan, sekaligus menjamin hasil mutu panen ke depannya. Pemanfaatan SGH tersebut tidak hanya diperuntukkan tanaman cabai rawit saja namun bisa juga untuk meningkatkan kualitas komoditas tanaman lainnya. Diharapkan, ke depannya green house dapat menjadi tren pola pertanian yang efisien dan dapat membantu meningkatkan produksi pertanian menuju pertanian maju, mandiri dan modern.
- q. Pemkab Banyuwangi terus memberdayakan para Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayur (Sistersay). Program Sistersay merupakan penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Program ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Dengan program ini satu lahan terintegrasi berbagai sektor ketahanan pangan. Tersedia tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan sistem bioflok, serta kandang ternak dalam satu lahan. Seperti yang dilakukan oleh KWT Desa Setail, Kecamatan Genteng, di Embung Kenitu. Di lahan persawahan yang dekat dengan bendungan irigasi tersebut, terdapat sistem terintegrasi mulai lahan sayuran seperti tomat, terong, dan cabai. Selain itu, di lahan tersebut terdapat budidaya lele melalui sistem bioflok, juga terdapat peternakan ayam. Mendukung apa yang telah mereka lakukan, Pemkab Banyuwangi memberikan bantuan 2000 bibit sayuran, seperti tomat, terong, dan cabai. Juga sebuah kolam bioflok beserta 1000 benih ikan lele, 50 ekor ayam dan kandang portable, serta 5 karton pupuk cair. Dengan program ini diharapkan bisa memacu pemulihan ekonomi di desa ini. Ibu-ibu tani bisa mengelola lahan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, bahkan bisa juga menambah penghasilan. Para penerima diharapkan bisa merawat dan mengembangkan bantuan tersebut. Kalau panen tidak diperbolehkan dijual semua, dan harus disisakan untuk kebutuhan konsumsi. Program ini disambut positif oleh para wanita tani yang merasa sangat membantu. Semuanya ada dalam satu lahan, ada sayuran, ikan, juga ayam yang menghasilkan daging dan telur. Ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi warga kami. Bahkan kalau panen banyak, bisa dijual untuk nambah pemasukan keluarga. Sistersay merupakan

program penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Utamanya di desa yang rawan stunting. Lahan ini menjadi prioritas di desa yang rawan stunting. Di desa tersebut, dipilih satu lingkungan yang dijadikan pusat percontohan. Dinas Pertanian akan memfasilitasi dan membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Satu lahan 'Sistersay' akan mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Pangan berupa 50 ekor ayam dan kandang portable, sebuah kolam lele bioflok termasuk benihnya, 1 unit peralatan hidroponik, serta benih sayurannya. Dengan demikian kebutuhan pangan sumber karbohidrat, vitamin, protein nabati dan hewani dapat tersedia di satu pekarangan. Lahan ini dikelola oleh pengurus yang telah ditunjuk. Hasilnya bisa dikelola dan dimanfaatkan bersama. Misalnya, kalau ada yang butuh telur, bisa ambil telurnya. Kalau butuh lele, juga tinggal ambil sesuai kebutuhannya. Dengan cara ini, diharapkan kebutuhan gizi warga bisa tercukupi sekaligus bisa menambah penghasilan perempuan tani.

- r. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak agar bisa terus meningkatkan produksi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan produk-produk peternakan, termasuk telur ayam. Alhamdulillah, ternyata kebutuhan telur di Banyuwangi bisa dipenuhi oleh peternak lokal. Beberapa peternakan ayam di Banyuwangi telah dikelola secara modern menggunakan mesin. Dengan memakai sistem modern seperti ini, peternakan ayam yang biasanya dikenal bau, menjadi tidak berbau. Ayam dibersihkan tiap hari agar ayam sehat tidak mudah terserang penyakit. Demikian juga untuk pakan tiap hari dilakukan sterilisasi agar tidak terdapat lalat. Sementara limbah seperti kotoran ayam langsung diturunkan ke lantai dasar dan dikeringkan sehingga tidak berbau, yang selanjutnya dikirim ke pengepul pupuk. Di Banyuwangi kebutuhan telur mencapai 193 ton per pekan. Sementara produksi telur mencapai 218 ton per pekan setara dengan 872 ton per bulan. Sehingga untuk stok kebutuhan telur masih relatif aman di Banyuwangi.
- s. Dinas PU Pengairan menunjang optimalisasi produktivitas dan distribusi pertanian, Pemkab. Banyuwangi menetapkan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai salah satu prioritas pada tahun 2024. Fokus infrastruktur yang dibangun adalah fasilitas sumberdaya air seperti embung dan jalan usaha tani penghubung antar desa yang bisa memudahkan petani dalam mendistribusikan hasil panennya. Sektor pertanian adalah salah satu sektor terpenting dalam perekonomian masyarakat Banyuwangi. Jadi selain teknis pertaniannya diperkuat, misalnya dengan inovasi budidaya maupun pasca panen, juga dibangun infrastrukturnya, terutama untuk sumberdaya air. Aliran air ke lahan harus dipastikan tidak macet dan dalam jumlah yang cukup. Dengan pembangunan irigasi yang berkelanjutan, ditargetkan persentase ketersediaan air bagi petani bertambah dari saat ini 200% menjadi 230% dalam dua atau tiga tahun ke depan. Artinya, sebagian petani atau sekitar 30% bisa menambah jumlah masa tanamnya, dari yang dulu hanya dua kali bisa menjadi tiga kali dalam setahun.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Untuk mendukung kelancaran distribusi dan memperlancar mobilitas warga, pada tahun 2024 pembangunan infrastruktur fisik kembali menjadi salah satu prioritas karena dapat meningkatkan dampak ekonomi. Bupati secara rutin mengecek hasil pembangunan infrastruktur jalan yang telah diselesaikan, salah satunya jalan yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Tegalsari, yakni Desa Dasri, Karangdoro, dan Karangmulyo. Dengan rincian Jalan Desa Dasri - Karangdoro - Karangmulyo sepanjang 8,4 Km dengan lebar 6 meter. Dan pula ruas Jalan Karangdoro - Karangmulyo sepanjang 2,3 Km dengan penambahan lebar dari 3 meter menjadi 8 meter. Jalan tersebut merupakan hasil dari

perbaikan dan pembangunan jalan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi pada tahun lalu. Sepanjang 2023, Pemkab Banyuwangi melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 698 kilometer. Tidak hanya jalan, Pemkab Banyuwangi juga memperbaiki dan membangun 65 jembatan. 8 jembatan di antaranya yang rusak akibat bencana banjir bandang tahun lalu dan kini telah selesai dibangun. Bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni juga dilaksanakan. Pada tahun 2024 Pemkab kembali akan memfokuskan pengerjaan jalan penghubung antara kecamatan dan desa. Termasuk juga penyelesaian lanjutan dan pelebaran jalan yang dikerjakan di tahun 2023. Salah satu yang akan dikerjakan di tahun 2024 ini adalah pelebaran jalan Wiroguna menjadi 12 meter sepanjang 1,9 Km. Juga ruas jalan Dasri sepanjang 1,4 Km dengan pelebaran jalan 3 meter menjadi 8 m. Jalan Wiroguno ini akan menjadi jalan alternatif utama bagi kendaraan besar dari arah Terminal Wiroguno menuju Gambiran. Sehingga kendaraan besar tidak perlu melewati pusat Kecamatan Genteng, namun bisa melewati jalan Wiroguno tersebut.

- b. Untuk melengkapi moda transportasi dari dan ke Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi telah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero agar membuka relasi baru, Malang, Jakarta, dan Bandung. Untuk relasi baru Banyuwangi-Malang akan menggunakan kereta kelas eksekutif. Pembukaan rute ini sebagai respon atas tingginya animo penumpang terhadap rute Banyuwangi-Malang. Selama ini relasi Banyuwangi-Malang dilayani kelas ekonomi menggunakan kereta Tawang Alun. Selama ini animo masyarakat atas rute Banyuwangi - Malang sangat tinggi. Seperti saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 lalu, tiket untuk relasi ini selalu ludes diserbu penumpang. Bahkan tiket sudah sold out sejak pertengahan Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Relasi Banyuwangi - Malang pp, menggunakan set kereta baru. Hadirnya relasi baru dengan kelas eksekutif ini, harapannya semakin mendorong kunjungan wisatawan ke Banyuwangi dan mendorong pergerakan ekonomi yang semakin masif. PT KAI juga tengah menyiapkan rute Banyuwangi-Jakarta PP. Rute ini akan dilayani menggunakan kereta Blambangan Ekspres yang saat ini sudah beroperasi rute Semarang-Banyuwangi. Selain itu, PT KAI juga sedang mengkaji potensi pembukaan rute Banyuwangi-Bandung melewati Surabaya sesuai permintaan Pemkab Banyuwangi.
- c. Pemkab Banyuwangi melalui koordinasi intensif berhasil menggandeng Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun skybridge yang akan menghubungkan Stasiun Kereta Api Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ditargetkan Agustus 2024, jembatan layang (skybridge) ini mulai dikerjakan. Lokasi Stasiun Ketapang dan Pelabuhan Ketapang berdekatan sekitar 200 meter. Keduanya dipisahkan oleh jalan raya Banyuwangi-Situbondo yang cukup ramai. Selama ini penumpang kereta api yang akan menuju ke pelabuhan dan sebaliknya berjalan kaki. Dengan adanya skybridge nantinya akses penumpang menuju dua pusat transportasi tersebut akan lebih mudah dan aman. Selain mempermudah akses bagi penumpang, keberadaan skybridge ini nantinya akan menjadi ikon baru bagi wisata Kota Banyuwangi. Fasilitas ini akan mempermudah konektivitas para pengguna moda kereta dan kapal. Selain mempermudah untuk pindah moda, skybridge ini bisa menjadi ikon baru di Banyuwangi. Apalagi, Pelabuhan Ketapang menjadi jalur utama Jawa menuju Bali. Desain arsitektur skybridge akan mengadopsi kearifan dan budaya sebagai identitas Banyuwangi. Produk properti dengan arsitektur yang mengadopsi kearifan lokal bisa menjadi landmark atau ikon baru pariwisata. Kemenhub melihat potensi ini dan akan memaksimalkan moda transportasi yang ada di Banyuwangi. Kebetulan di Banyuwangi moda transportasinya sudah lengkap darat, laut dan udara sehingga Kemenhub akan mengintegrasikan moda darat dan lautnya dengan membangun skybridge antara Stasiun Ketapang - Pelabuhan Ketapang. Rencananya skybridge ini

juga akan dilengkapi fasilitas untuk UMKM Banyuwangi sesuai dengan semangat Banyuwangi yang terus memajukan UMKM lokal.

- d. Selain infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen. Aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan dibangun dan diperbaiki. Ini agar proses pemasaran hasil-hasil pertanian dari desa ke kota berjalan dengan lancar. Dengan aksesibilitas yang meningkat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani.
- e. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Banyuwangi.
- f. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan masih terus menyelenggarakan angkutan sekolah gratis untuk mengurangi beban orangtua siswa dan angkutan pariwisata gratis yang bisa dimanfaatkan wisatawan secara gratis untuk menuju ke beberapa destinasi wisata andalan Banyuwangi. Antara lain Pulau Merah, Djawatan, Dusun Kakao Glenmore, Gunung Ijen, dan Bangsring Underwater. Angkutan wisata ini dibuat untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung ke sejumlah obyek wisata di Banyuwangi.

4. Komunikasi Efektif

- a. Bupati Banyuwangi memanfaatkan datangnya Bulan Ramadan untuk menyapa masyarakat. Melalui kegiatan Safari Ramadan, Bupati Banyuwangi berkeliling untuk buka bersama dan salat tarawih berjamaah di sejumlah desa. Bupati bersama masyarakat bersilaturahmi sekaligus buka bersama dengan mengundang sejumlah tokoh agama dan ormas keislaman. Kesempatan ini digunakan untuk mensosialisasikan berbagai program yang saat ini sedang dijalankan, termasuk terkait peran masyarakat dalam pengendalian inflasi sekaligus juga belanja persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menyukseskan program-program pemerintah. Terutama, dalam pengendalian inflasi, mengentaskan kemiskinan ekstrem, bantuan rantang kasih untuk warga sebatangkara hingga pengentasan anak putus sekolah.
- b. Bupati Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) / High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam rakor tersebut, tidak hanya diikuti oleh kepala dinas saja. Namun, hingga pejabat di eselon tiga di masing-masing dinas juga dilibatkan. Bupati menekankan agar arahan presiden tersebut bisa dipahami oleh birokrasi di semua tingkatan. Sehingga semua bisa bergerak bersama dan seirama. Ada beberapa point penting yang menjadi catatan utama, diantaranya adalah ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tercatat positif, tapi harus tetap berhati-hati dan waspada. Untuk itu, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri. Memastikan program daerah harus bisa berdampak luas dan dapat menekan inflasi. Jangan hanya sekadar menjalankan program. Tapi, harus berorientasi pada output. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh SKPD teknis untuk bersama-sama turun ke masyarakat. Mengecek kebutuhan dan meninjau harga sehingga potensi inflasi bisa ditekan sedini mungkin. Seluruh SKPD harus saling bersinergi dan melepas ego sektoral dalam menyelesaikan berbagai tantangan daerah dan mencapai tujuan bersama.
- c. Menghadapi inflasi dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemangku kepentingan, diantaranya Pemkab Banyuwangi dengan Bank Indonesia Jember. Keduanya saling mendukung dan berkoordinasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. Beberapa program yang diimplementasikan di antaranya, pelatihan integrated

ecofarming, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), menjaga kecukupan stok pangan, hingga digitalisasi pertanian. Untuk pelatihan ecofarming, dilakukan bersama gabungan kelompok tani (gapoktan) Turi Putih dari Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Pelatihan tersebut fokus untuk pengembangan klaster beras dan cabai. Dalam pelaksanaannya, petani diberikan pembinaan dan pelatihan secara kontinyu dari hulu sampai hilir. Selain memperkuat produktivitas, petani juga didorong peningkatan hilirisasi produk pangan sehingga petani bisa mendapatkan nilai tambah. Pendampingan BI kepada gapoktan Turi Putih telah berjalan sejak 2021. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain, pelatihan digital farming komoditas padi, fasilitasi alat digital farming, bantuan 10 ribu bibit cabai, serta fasilitasi pasar. Selain itu, pada 2022 BI juga memberikan bantuan berupa 1 unit truk untuk mendukung program Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu. Tahun 2024, BI kembali memberikan bantuan alat pertanian berupa Kultivator. Pemkab Banyuwangi juga terus memperluas kerjasama antar daerah dengan Pemkab Buleleng dan Pemkot Denpasar Provinsi Bali. Koordinasi antar daerah terus didorong untuk memenuhi pasokan pangan dari daerah yang berlebihan ke daerah yang kekurangan. Dalam kerja sama ini, Banyuwangi sebagai salah satu sentra cabai akan memasok untuk kebutuhan Buleleng dan Denpasar. Sementara Buleleng akan memasok kebutuhan bawang merah ke Banyuwangi, sehingga bisa saling menguatkan. Banyuwangi juga terus mendorong gerakan peduli inflasi berbasis rumah tangga dan desa. Salah satunya, menggerakkan ASN dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur-mayur, misalnya, cabai, bawang merah, hingga beternak dalam skala kecil. Desa juga terus didorong untuk menganggarkan 20 persen Dana Desa guna mendukung ketahanan pangan.

- d. Pemkab Banyuwangi aktif menyampaikan beragam kebijakan dan program terkait pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Diantaranya terkait Pelaksanaan Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri 1445 H juga disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Nomor: 500/355/429.021/2024 pada tanggal 4 Maret April 2024.
- e. Untuk menggalang partisipasi pengendalian inflasi dari segenap OPD di Banyuwangi, pada tanggal 4 Maret 2024, Bupati Banyuwangi kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 510/356/429.021/2024 tentang Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2024 serta Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024.
- f. Bupati Banyuwangi pada tanggal 4 Maret 2024 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 005/357/429.021/2024 tentang Himbauan Pengendalian Inflasi kepada para Camat se Kabupaten Banyuwangi agar diteruskan kepada semua tokoh agama dan masyarakat untuk mengendalikan gaya konsumtif masyarakat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
- g. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan pencatatan informasi data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya setiap hari di 14 pasar daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui www.tp.id.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang *diupdate* secara harian.
- h. Setiap bulan melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan

untuk pengendalian inflasi.

- i. TPID Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Kegiatan operasi pasar murah beras bersama BULOG Banyuwangi akan terus dilaksanakan dengan titik yang semakin diperluas di seluruh wilayah kecamatan di Banyuwangi secara masif.
- b. Pemkab Banyuwangi akan terus mendorong agar di setiap pasar ada Top Si Wangi yang setiap harinya menyediakan bahan pokok dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
- c. Bupati bersama TPID Kabupaten Banyuwangi tetap akan aktif turun langsung untuk memonitor ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di 14 pasar daerah di Banyuwangi.
- d. Memaksimalkan Gerakan belanja “cantik” di pasar rakyat dan UMKM yang dilaksanakan di setiap tanggal dan bulan kembar, sebagai upaya menggerakkan perekonomian warga, sekaligus untuk membantu warga yang membutuhkan karena hasil belanjanya langsung didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- e. Pemkab Banyuwangi akan terus melaksanakan Gerakan “ASN Berbagi” untuk bergotong royong membantu warga miskin dengan cara menjadi "orang tua asuh bagi sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data *by name by address* pada aplikasi Smart Kampung-nya masing-masing.
- f. Keterlibatan banyak pihak untuk mendorong perekonomian daerah sangat dibutuhkan sehingga Pemkab Banyuwangi akan terus melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mendukung penguatan ekonomi warga. Baznas Banyuwangi memberikan dukungan berupa dana bergulir modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Pada tahun 2024 ini, dikucurkan dana sebesar Rp. 500 juta untuk penguatan usaha para pelaku mikro.
- g. Berbagai program peningkatan ekonomi arus bawah terus dilaksanakan di Banyuwangi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli serta menjaga keterjangkauan harga,. Warung Naik Kelas (Wenak), berbagai pelatihan serta pembagian alat usaha pada tahun 2024 ditargetkan bisa menyentuh 3.700 orang. Termasuk program Ongkir Gratis akan terus dilaksanakan di tahun ini.
- h. Pemkab Banyuwangi akan terus melakukan berbagai upaya untuk menaikkan kelas UMKM lokal, dengan menggandeng perusahaan e-commerce untuk memperluas jangkauan market UMKM melalui pemasaran online (digital marketing). Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, UMKM terus didorong untuk memanfaatkan market place dan harus terus di-up grade, mulai membantu pengemasan produk, meningkatkan kualitas produk, memfasilitasi sejumlah ijinnya, serta memperluas pasarnya.
- i. Pemkab Banyuwangi akan terus mengkoordinir korporasi agar anggaran CSR bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan.
- j. Program kursus gratis (14 jenis kursus berbagai bidang) bagi warga dalam program Banyuwangi Ayo Kursus, yang memfasilitasi beragam pelatihan keterampilan mendapat

respon yang sangat baik dari masyarakat. Sekitar 600 orang yang mengikuti program menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan bahkan ada pula yang akhirnya berwirausaha secara mandiri.

- k. Pemkab Banyuwangi setiap tahunnya juga menggelar berbagai program peningkatan kemampuan bisnis, keterampilan hingga memberikan modal usaha sampai ratusan juta rupiah, di antaranya model inkubasi bisnis bagi pengusaha muda melalui program Jagoan Banyuwangi.
- l. Untuk menjaga daya beli masyarakat melalui cara pengurangan beban biaya, Pemkab Banyuwangi akan melanjutkan sejumlah program khusus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Ada tujuh program yang disasarkan bagi pelajar kurang mampu tersebut. Antara lain bantuan biaya hidup pelajar tidak mampu, Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah), bantuan uang transport siswa tidak mampu, beasiswa kuliah Banyuwangi Cerdas, bantuan alat pembelajaran, serta bantuan uang saku.
- m. Pemkab Banyuwangi juga akan terus menganggarkan pemberian jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 13.457 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Banyuwangi sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan dari resiko yang terjadi selama menjalankan tugasnya. Ini sebagai apresiasi kepada para RT/RW yang terus melakukan pelayanan kepada warganya.
- n. Berbagai program pengentasan kemiskinan terus digencarkan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya, pengentasan kemiskinan dengan instrumen program padat karya. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera. Program itu dilakukan dengan melakukan intervensi kepada warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Dari data tersebut, warga pra sejahtera yang masih produktif, akan dilibatkan dalam program padat karya yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PU Pengairan yang menargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi. Program ini akan diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya. Tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemkab Banyuwangi akan terus melibatkan secara intensif dinas-dinas teknis yang bergerak di sektor hulu, yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan yang berperan menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi.
- b. Dinas Pertanian dan Pangan juga melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Banyuwangi dengan optimalisasi produksi, pengelolaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan.
- c. Bupati bersama TPID Kabupaten Banyuwangi tetap akan aktif turun langsung untuk memonitor ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di 14 pasar daerah di Banyuwangi.
- d. Bupati bersama TPID Kabupaten Banyuwangi sangat serius dalam memantau dan memastikan agar selama Ramadhan hingga Idul Fitri, stok berbagai kebutuhan pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi dalam status aman. BULOG dan Pertamina siap bersinergi untuk menjamin kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri.

Bupati juga rajin turun langsung dan mengingatkan jajarannya untuk sering tinjau langsung ke beberapa sentra tanaman pangan dan hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah untuk memastikan ketersediaan stoknya. Dinas Pertanian dan Pangan akan terus berupaya untuk memastikan agar produksi cabai tetap tinggi dalam berbagai musim. Budidaya cabai dilakukan teratur sepanjang tahun agar ketersediaannya selalu bisa mencukupi permintaan pasar. Modifikasi teknologi perlindungan tanaman dan teknologi irigasi hemat air dipadukan untuk meningkatkan produktivitas cabai.

- f. Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendukung pengembangan cabai rawit dengan memberikan bantuan pupuk organik dan pengendalian hama penyakit serta pemberian bantuan sarana pengolahan dan pemasaran berupa fasilitas pasar lelang dan *packing house*/bangsal kemas yang bisa dimanfaatkan petani untuk menyimpan sementara hingga melakukan penanganan pasca panen sebelum cabai siap dipasarkan.
- g. Dinas Pertanian dan Pangan juga akan terus rutin menggelar sekolah lapang untuk memberikan pembekalan kepada petani tentang tata cara budidaya yang baik (*Good Agricultural Practises/GAP*), misalnya prosedur pengolahan tanah yang tepat, pemilihan bibit, pemberian pupuk, hingga cara pengendalian hama penyakit. Kegiatan ini untuk menambah skill dan pengetahuan petani sejak persiapan masa tanam hingga penanganan pasca panen yang tepat (*Good Handling Practices/GHP*), sehingga mutu dan daya saing produk tetap terjamin.
- h. Dinas Pertanian dan Pangan juga terus melakukan upaya untuk memperkuat ketersediaan pasokan di Kabupaten Banyuwangi dengan optimalisasi produksi, pengelolaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan.
- i. Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk sebagai penyangga komoditas cabai rawit secara nasional oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas tersebut pada masa mendatang telah menyiapkan lahan sekitar 40 hektar untuk program penanaman cabai tersebut.
- j. Banyuwangi juga terus mendorong Gerakan Peduli Inflasi berbasis rumah tangga dan desa dengan menggerakkan ASN dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur-mayur, misalnya, cabai, bawang merah, hingga beternak dalam skala kecil. Desa juga terus didorong untuk mengalokasikan 20 persen Dana Desa guna mendukung ketahanan pangan.
- k. Untuk menjaga ketersediaan pasokan khususnya beras, akan terus dilaksanakan pengembangan teknologi budidaya padi di tingkat kelompok tani, penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan dan meningkatkan kesuburan lahan sawah, dan pengembangan beras organik sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk beras yang dihasilkan petani. Fasilitas sarana produksi seperti : benih padi unggul, ketersediaan pupuk, dan insektisida untuk gerakan pengendalian hama penyakit tanaman juga akan terus diberikan sehingga akan meningkatkan produksi beras petani. Penggunaan benih padi unggul baru dan ketersediaan pupuk dan insektisida secara tepat dan tersistematis dengan demplot percontohan teknologi budidaya di kelompok tani unggulan akan terus didorong sehingga cepat tersebar secara luas ke petani.
- l. Pemkab. Banyuwangi akan terus mengawal perolehan pupuk bersubsidi untuk petani di Banyuwangi sehingga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Namun Pemkab Banyuwangi juga memberikan bantuan pupuk organik cair gratis kepada petani agar petani mulai beralih ke pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memiliki prospek pasar yang lebih bagus ke depannya.
- m. Program pemberian pupuk organik bagi petani yang digulirkan oleh Pemkab Banyuwangi akan terus dilanjutkan karena memberikan hasil positif pada hasil pertanian daerah contohnya cabai sehingga bisa diteruskan dan disebarluaskan manfaatnya agar semakin banyak petani yang menggunakan pupuk organik.

e.

sendiri memiliki beberapa kelebihan, di antaranya bisa meningkatkan produksi, tanaman menjadi berumur lebih panjang dan hasil panen tidak cepat rusak.

- n. Bupati Banyuwangi telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 agar distribusinya berjalan lancar hingga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menunjang peningkatan produksi tanaman pangannya. Selanjutnya segenap dinas terkait beserta stakeholder akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan surat edaran tersebut.
- o. Pemkab Banyuwangi akan terus memperluas penerapan pertanian yang presisi untuk mengatasi berkurangnya kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat, dengan layanan uji tanah untuk pemupukan tepat dosis berbasis internet of things (IoT). Layanan uji kualitas tanah tersebut menggunakan alat uji tanah, Jinawi.
- p. Pemkab Banyuwangi terus mendorong petani untuk beralih ke pertanian organik. Selain lebih ramah lingkungan, produk hasil pertanian organik memiliki daya jual tinggi. Berbagai program yang akan diteruskan di antaranya adalah mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, agen hayati, demplot pertanian organik, hingga memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani. Hingga saat ini pupuk organik cair yang telah dibagikan mencapai 466.636 liter. Jumlah ini bisa mengcover lahan seluas 83.524 ha.
- q. Banyuwangi memiliki teknologi budidaya padi yang mampu panen 4 kali dalam setahun. Salah satunya adalah varietas Indeks Pertanaman (IP) 400 yang banyak ditanam di Banyuwangi dan memiliki waktu panen yang lebih cepat, antara 70-100 Hari Setelah Sebar (HSS). Ini lebih cepat dibanding varietas padi biasa, yang baru bisa panen pada usia 110-120 HSS. Selain pemilihan varietas, kunci keberhasilan IP 400 juga tergantung pada proses mekanisasi pengolahan sawah, mulai pengolahan tanah, persemaian benih, proses tanam, budidaya, hingga panen dilakukan menggunakan alat mesin pertanian dalam rangka mempercepat masa tanam.
- r. Untuk meningkatkan nilai tambah petani, Pemkab. Banyuwangi terus mendorong pengembangan beras organik. Sejumlah lahan beras organik kini terus dikembangkan di Banyuwangi. Pemkab. Banyuwangi juga memberi bantuan pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa. Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
- s. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian Pemkab. Banyuwangi. Pemkab. Banyuwangi terus mendorong warga untuk mengembangkan pertanian organik dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan. Dinas Pertanian dan Pangan akan terus mendorong untuk melakukan pembudidayaan tanaman dengan cara memanfaatkan lahan atau pekarangan. Diversifikasi tanaman semacam itu bisa meningkatkan ketahanan pangan.
- t. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong para petani baik tanaman pangan maupun hortikultura. Selain untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemkab Banyuwangi juga mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan harian dengan memanfaatkan pekarangan rumah (*family farming*). Keterbatasan lahan tidak menjadi penghalang untuk aktivitas berkebun. Pemkab Banyuwangi terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang terbatas sebagai sumber pangan dan tambahan penghasilan bagi keluarga. Selama tiga bulan terakhir, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi membagikan 22.265 bibit tanaman cabai kepada wanita kelompok tani untuk ditanam di pekarangan rumahnya.
- u. Pemkab Banyuwangi akan terus menggencarkan pembangunan jaringan irigasi tersier (JIT) di desa-desa untuk mendukung pasokan sumberdaya air dalam peningkatan produktivitas pertanian. Sistem irigasi ini sangat penting karena untuk mengatur air dari ke hulu agar rata ke irigasi kawasan pertanian. JIT sangat penting karena akan

berdampak pada meningkatnya produktivitas pertanian.

- v. Mengoptimalkan Smart Green House (SGH) cabai rawit sebanyak 14 SGH di beberapa kecamatan di Banyuwangi. SGH menjadi tempat pembibitan dan perawatan cabai, dan tanaman sayuran dalam polibag hingga berbuah. SGH menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk mempertahankan kualitas dan produksi cabai di Banyuwangi tetap unggul. Program SGH bertujuan untuk mengintensifkan perawatan, sekaligus menjamin hasil mutu panen.
- w. Pemkab Banyuwangi terus memberdayakan para Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayur (Sistersay). Program Sistersay merupakan penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Program ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Dengan program ini satu lahan terintegrasi berbagai sektor ketahanan pangan. Tersedia tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan sistem bioflok, serta kandang ternak dalam satu lahan.
- x. Pemkab. Banyuwangi terus mendorong peternakan rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik telur, susu maupun daging. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak agar bisa terus meningkatkan produksi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan produk-produk peternakan.
- y. Untuk menjaga ketersediaan air sebagai pendukung produksi pertanian dan perikanan, Pemkab Banyuwangi menggencarkan konservasi di beberapa sumber mata air dan di kawasan Gunung Ijen dengan melakukan penanaman tanaman keras. Bersamaan dengan itu, Pemkab Banyuwangi juga mulai memperbanyak parit buntu penahan air (rorak). Konservasi di wilayah hulu harus segera dilakukan sebagai salah satu upaya menyiapkan *catchment area* (daerah tangkapan air) di kawasan lereng Ijen.
- z. Dinas PU Pengairan menunjang optimalisasi produktivitas dan distribusi pertanian, dengan membangun infrastruktur fasilitas sumberdaya air seperti embung dan jalan usaha tani penghubung antar desa yang bisa memudahkan petani dalam mendistribusikan hasil panennya. Aliran air ke lahan harus dipastikan tidak macet dan dalam jumlah yang cukup. Dengan pembangunan irigasi yang berkelanjutan, ditargetkan persentase ketersediaan air bagi petani bertambah dari saat ini 200% menjadi 230% dalam dua atau tiga tahun ke depan. Artinya, sebagian petani atau sekitar 30% bisa menambah jumlah masa tanamnya, dari yang dulu hanya dua kali bisa menjadi tiga kali dalam setahun.
- aa. Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu), karena selain berfungsi menjaga daerah aliran sungai (DAS), program kolaboratif yang melibatkan lintas sektoral bersama-sama merawat kebersihan sungai yang ada di sekitar lingkungannya diharapkan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
- ab. Pemkab Banyuwangi terus melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di desa-desa. Sistem irigasi ini sangat penting karena untuk mengatur air dari ke hulu agar rata ke irigasi kawasan pertanian. JIT sangat penting karena akan berdampak pada meningkatnya produktivitas pertanian. Efek yang langsung dirasakan petani yakni adanya penambahan indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun, menjadi dua kali atau lebih.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemkab Banyuwangi untuk mendukung kelancaran distribusi dan memperlancar mobilitas warga, pada tahun 2024, masih akan memprioritaskan pembangunan

infrastruktur fisik karena dapat meningkatkan dampak ekonomi. Pada tahun 2023 Pemkab Banyuwangi telah melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 698 kilometer dan 65 jembatan.

- b. Pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen. Aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan dibangun dan diperbaiki. Ini agar proses pemasaran hasil-hasil pertanian dari desa ke kota berjalan dengan lancar. Dengan aksesibilitas yang meningkat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani.
- c. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan kondisi kelancaran lalu lintas dan manajemen lalu lintas dalam rangka memperlancar distribusi barang dan jasa di Kabupaten Banyuwangi.
- d. Selain infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen. Aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan dibangun dan diperbaiki agar proses pemasaran hasil-hasil pertanian dari desa ke kota berjalan dengan lancar. Dengan aksesibilitas yang meningkat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani.
- e. Untuk melengkapi moda transportasi dari dan ke Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi akan menindaklanjuti koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero agar membuka relasi baru, Malang, Jakarta, dan Bandung. Pembukaan rute ini sebagai respon atas tingginya animo penumpang terhadap rute Banyuwangi-Malang, Jakarta dan Bandung.
- f. Pemkab Banyuwangi mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera merealisasikan pembangunan *skybridge* yang akan menghubungkan Stasiun Kereta Api Ketapang dengan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
- g. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas perhubungan akan terus menyelenggarakan angkutan sekolah gratis untuk mengurangi beban orangtua siswa dan angkutan pariwisata gratis yang bisa dimanfaatkan wisatawan secara gratis untuk menuju ke beberapa destinasi wisata andalan Banyuwangi.

4. Komunikasi Efektif

- a. Bupati Banyuwangi mengevaluasi setiap minggu, tepatnya di hari Jum'at dalam Rapat Koordinasi Weekly Performance terkait pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden dalam upaya pengendalian inflasi dari masing-masing dinas teknis.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan secara konsisten terus melakukan pencatatan informasi data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya setiap hari di 14 pasar daerah di wilayah Kabupaten Banyuwangi, dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik.
- c. Bupati Banyuwangi mengeluarkan Surat Edaran tentang Penggunaan LPG Tabung 3 kg Bersubsidi Tepat Sasaran. Dengan demikian, penggunaan LPG 3 kg diharapkan bisa lebih tepat sasaran, salah satunya dengan melarang PNS menggunakan LPG 3 kg karena LPG ini merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.
- d. Setiap bulan melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
- e. TPID Kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten

Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan Operasi Pasar Beras bersama BULOG Banyuwangi dengan titik yang semakin diperluas di seluruh wilayah kecamatan di Banyuwangi secara masif.
- b. Dinas Pertanian dan Pangan mendukung kegiatan operasi pasar murah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bersama BULOG Banyuwangi dengan menyuplai produk-produk pertanian maupun peternakan. Pelaksanaannya akan terus dilaksanakan dengan titik yang semakin diperluas di seluruh wilayah kecamatan di Banyuwangi secara masif.
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bisa berkoordinasi dengan Bagian Protokol untuk memasukkan dalam Agenda Bupati untuk bersama TPID Kabupaten Banyuwangi turun langsung untuk monitoring ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di 14 pasar daerah di Banyuwangi.
- d. Memaksimalkan Gerakan belanja “cantik” di pasar rakyat dan UMKM yang dilaksanakan di setiap tanggal dan bulan kembar, sebagai upaya menggerakkan perekonomian warga, sekaligus untuk membantu warga yang membutuhkan karena hasil belanjanya langsung didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- e. Memasifkan Gerakan “ASN Berbagi” untuk bergotong royong membantu warga miskin dengan cara menjadi “orang tua asuh” bagi sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data *by name by address* pada aplikasi Smart Kampung.
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengakselerasi berbagai program peningkatan ekonomi arus bawah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli serta menjaga keterjangkauan harga. Warung Naik Kelas (Wenak), berbagai pelatihan serta pembagian alat usaha dan program Ongkir Gratis akan terus dilaksanakan di tahun ini.
- g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menaikkan kelas UMKM lokal, dengan menggandeng perusahaan e-commerce untuk memperluas jangkauan market UMKM melalui pemasaran online (digital marketing). UMKM terus didorong untuk memanfaatkan *marketplace* dan harus terus *di-up grade*, mulai membantu pengemasan produk, meningkatkan kualitas produk, memfasilitasi sejumlah ijinnya, serta memperluas pasarnya.
- h. Dinas Pendidikan harus terus mengawal pelaksanaan tujuh program yang disasarkan bagi pelajar kurang mampu tersebut, antara lain bantuan biaya hidup pelajar tidak mampu, Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah), bantuan uang transport siswa tidak mampu, beasiswa kuliah Banyuwangi Cerdas, bantuan alat pembelajaran, serta bantuan uang saku.
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terus bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk mendukung penguatan ekonomi warga, dengan memberikan dukungan berupa dana bergulir modal usaha bagi pelaku usaha mikro.
- j. Bappeda dan Bagian Perekonomian agar terus mengkoordinir korporasi untuk mengalokasikan anggaran CSR secara tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

k.

dan Perindustrian memastikan pelaksanaan program kursus gratis bagi warga dalam program Banyuwangi Ayo Kursus, yang memfasilitasi beragam pelatihan keterampilan.

- l. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian terus menganggarkan pemberian jaminan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 13.457 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Banyuwangi sehingga mereka bisa mendapatkan perlindungan dari resiko yang terjadi selama menjalankan tugasnya.
- m. Pemkab Banyuwangi bersama seluruh perangkat daerah akan terus menggencarkan program pengentasan kemiskinan melalui berbagai intervensi dengan instrumen program padat karya. Dinas PU CKPP dan Dinas PU Pengairan agar terus memperluas jangkauan program padat karya.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan mengoptimalkan peran dalam menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan terutama untuk komoditas yang sering menjadi pemicu terjadinya inflasi, seperti padi, cabai, bawang merah, telur maupun daging. Produktivitas harus terus didorong dengan menggunakan teknologi pertanian terkini, serta dengan menjalin sinergi bersama para stakeholder yang turut berperan di bidang pertanian.
- b. Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan lakukan terus upaya untuk memperkuat ketersediaan pasokan di Kabupaten Banyuwangi dengan optimalisasi produksi, pengelolaan cadangan pangan dan penganekaragaman pangan.
- c. Dinas Pertanian dan Pangan mendukung pengembangan cabai rawit dengan memberikan bantuan pupuk organik dan pengendalian hama penyakit serta pemberian bantuan sarana pengolahan dan pemasaran berupa fasilitas pasar lelang dan packing house/bangsas kemas yang bisa dimanfaatkan petani untuk menyimpan sementara hingga melakukan penanganan pasca panen sebelum cabai siap dipasarkan.
- d. Dinas Pertanian dan Pangan laksanakan secara rutin sekolah lapang untuk memberikan pembekalan kepada petani tentang tata cara budidaya yang baik (*Good Agricultural Practises/GAP*), misalnya prosedur pengolahan tanah yang tepat, pemilihan bibit, pemberian pupuk, hingga cara pengendalian hama penyakit. Kegiatan ini akan menambah skill dan pengetahuan petani sejak persiapan masa tanam hingga penanganan pasca panen yang tepat (*Good Handling Practices/GHP*), sehingga mutu dan daya saing produk tetap terjaga.
- e. Dinas Pertanian dan Pangan menyiapkan lahan sekitar 40 hektar untuk program penanaman cabai setelah Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai penyangga komoditas cabai rawit secara nasional oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas tersebut pada masa mendatang.
- f. Dinas Pertanian dan Pangan berperan untuk menjaga ketersediaan pasokan khususnya beras, harus terus melaksanakan pengembangan teknologi budidaya padi di tingkat kelompok tani, penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan dan meningkatkan kesuburan lahan sawah, dan pengembangan beras organik sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk beras yang dihasilkan petani. Fasilitasi sarana produksi seperti : benih padi unggul, ketersediaan pupuk, dan insektisida untuk gerakan pengendalian hama penyakit tanaman juga akan terus diberikan sehingga akan meningkatkan produksi beras petani. Penggunaan benih padi unggul baru dan ketersediaan pupuk dan insektisida secara tepat dan tersistematis dengan demplot percontohan teknologi budidaya di kelompok tani unggulan agar terus didorong sehingga cepat tersebar secara luas ke petani.

Dinas Pertanian dan Pangan terus kawal perolehan pupuk bersubsidi untuk petani di Banyuwangi sehingga pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 meskipun Pemkab Banyuwangi juga memberikan bantuan pupuk organik cair gratis kepada petani agar petani mulai beralih ke pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memiliki prospek pasar yang lebih bagus ke depannya.

- h. Dinas Pertanian dan Pangan agar terus melanjutkan program pemberian pupuk organik bagi petani karena memberikan hasil positif pada hasil pertanian daerah contohnya cabai sehingga bisa diteruskan dan disebarluaskan manfaatnya agar semakin banyak petani yang menggunakan pupuk organik.
- i. Dinas Pertanian dan Pangan buat Surat Edaran Bupati Banyuwangi tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 agar distribusinya berjalan lancar hingga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menunjang peningkatan produksi tanaman pangannya. Selanjutnya laksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan surat edaran tersebut.
- j. Dinas Pertanian dan Pangan perluas penggunaan teknologi budidaya padi dan varietas Indeks Pertanaman (IP) 400 yang memiliki waktu panen yang lebih cepat, antara 70-100 Hari Setelah Sebar (HSS). Selain pemilihan varietas, kunci keberhasilan IP 400 juga tergantung pada proses mekanisasi pengolahan sawah, mulai pengolahan tanah, persemaian benih, proses tanam, budidaya, hingga panen dilakukan menggunakan alat mesin pertanian dalam rangka mempercepat masa tanam.
- k. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong pengembangan beras organik untuk meningkatkan nilai tambah petani. Lanjutkan program bantuan pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa. Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
- l. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong untuk melakukan pembudidayaan tanaman dengan cara memanfaatkan lahan atau pekarangan. Diversifikasi tanaman semacam itu bisa meningkatkan ketahanan pangan.
- m. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong terwujudnya ketahanan pangan dengan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan harian dengan memanfaatkan pekarangan rumah (*family farming*). Keterbatasan lahan tidak menjadi penghalang untuk aktivitas berkebun. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang terbatas sebagai sumber pangan dan tambahan penghasilan bagi keluarga.
- n. Dinas Pertanian dan Pangan mengoptimalkan *Smart Green House* (SGH) cabai rawit sebagai tempat pembibitan dan perawatan cabai, dan tanaman sayuran untuk mempertahankan kualitas dan produksi cabai di Banyuwangi tetap unggul. Program SGH bertujuan untuk mengintensifkan perawatan, sekaligus menjamin hasil mutu panen.
- o. Dinas Pertanian dan Pangan terus memberdayakan para Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayur (Sistersay). Program Sistersay merupakan penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Program ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Dengan program ini satu lahan terintegrasi berbagai sektor ketahanan pangan. Tersedia tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan sistem bioflok, serta kandang ternak dalam satu lahan.
- p. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong peternakan rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik telur, susu maupun daging. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak agar bisa terus meningkatkan produksi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan produk peternakan.
- q. Dinas Pertanian dan Pangan terus mendekatkan pelayanan dan meningkatkan status
- g.

kesehatan hewan ternak di Banyuwangi agar bisa bereproduksi dan memproduksi secara maksimal, melalui pelayanan kesehatan keliling untuk hewan ternak.

- r. Dinas Pertanian dan Pangan melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Banyuwangi dengan optimalisasi produksi, pengelolaan cadangan pangan dan penganeekaragaman pangan.
- s. Laksanakan secara masif Gerakan Peduli Inflasi berbasis rumah tangga dan desa dengan menggerakkan ASN dan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur-mayur, misalnya, cabai, bawang merah, hingga beternak dalam skala kecil. Desa juga terus didorong untuk mengalokasikan 20 persen Dana Desa guna mendukung ketahanan pangan.
- t. Dinas Pertanian dan Pangan terus upayakan menjaga ketersediaan pasokan khususnya beras, melalui pengembangan teknologi budidaya padi di tingkat kelompok tani, penggunaan pupuk organik untuk mengembalikan dan meningkatkan kesuburan lahan sawah, dan pengembangan beras organik sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk beras yang dihasilkan petani.
- u. Dinas Pertanian dan Pangan memberikan fasilitasi sarana produksi seperti : benih padi unggul, ketersediaan pupuk, dan insektisida untuk gerakan pengendalian hama penyakit tanaman sehingga akan meningkatkan produksi beras petani. Penggunaan benih padi unggul baru dan ketersediaan pupuk dan insektisida secara tepat dan tersistematis dengan demplot percontohan teknologi budidaya di kelompok tani unggulan akan terus didorong sehingga cepat tersebar secara luas ke petani.
- v. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan akan terus memperluas penerapan pertanian yang presisi untuk mengatasi berkurangnya kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat, dengan layanan uji tanah untuk pemupukan tepat dosis berbasis internet of things (IoT). Layanan uji kualitas tanah tersebut menggunakan alat uji tanah, Jinawi.
- w. Pemkab Banyuwangi juga terus mendorong petani untuk beralih ke pertanian organik. Selain lebih ramah lingkungan, produk hasil pertanian organik memiliki daya jual tinggi. Berbagai program yang akan diteruskan di antaranya adalah mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, agen hayati, demplot pertanian organik, hingga memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani.
- x. Dinas PU Pengairan agar terus membenahi dan menambah jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier akan terus dibenahi dan ditambah sebagai upaya percepatan daya hantar air dari hulu ke lahan-lahan pertanian. Selain infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen.
- y. Dinas PU Pengairan agar melanjutkan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu), karena selain berfungsi menjaga daerah aliran sungai (DAS), program kolaboratif yang melibatkan lintas sektoral bersama-sama merawat kebersihan sungai yang ada di sekitar lingkungannya diharapkan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen. Aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan dibangun dan diperbaiki oleh Dinas PU CKPP. Ini agar proses pemasaran hasil-hasil pertanian dari desa ke kota berjalan dengan lancar. Dengan aksesibilitas yang meningkat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan Program Optimalisasi

Perdagangan Dalam Negeri yang dikemas dalam Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Perluasan Perdagangan Antar Daerah serta untuk mempertemukan para pelaku usaha dan IKM.

- c. Dinas Perhubungan harus terus memantau manajemen lalu lintas dan proses kelancaran distribusi barang dan jasa serta angkutan orang di Kabupaten Banyuwangi agar tidak mengalami gangguan sehingga mempengaruhi inflasi di Banyuwangi.
- d. Dinas Perhubungan menyelenggarakan angkutan sekolah gratis untuk mengurangi beban orangtua siswa dan angkutan pariwisata gratis yang bisa dimanfaatkan wisatawan secara gratis untuk menuju ke beberapa destinasi wisata andalan Banyuwangi.
- e. Dinas Perhubungan komunikasi dengan PT Angkasa Pura II juga terus dijalin untuk memantau dan mengantisipasi fluktuasi tarif angkutan udara
- f. Dinas Perhubungan membuka komunikasi dengan maskapai yang membuka rute penerbangan di Banyuwangi agar tetap eksis karena keberadaannya sangat efektif untuk membuka aksesabilitas dan menggerakkan ekonomi di Banyuwangi.
- g. Dinas PU Pengairan serta Dinas PU CKPP prioritaskan program pembangunan dan perbaikan irigasi, serta perbaikan dan pembangunan jalan juga jembatan menuju tempat produksi pertanian agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang diprogramkan sehingga akan turut mendukung produktivitas pertanian.
- h. Dinas PU Pengairan agar terus membenahi dan menambah jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier akan terus dibenahi dan ditambah sebagai upaya percepatan daya hantar air dari hulu ke lahan-lahan pertanian. Selain infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen.

4. Komunikasi Efektif

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terus melakukan monitoring harga harian dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Banyuwangi agar harga barang tetap terkendali.
- b. Mewaspadai fluktuasi harga dengan memahami mekanisme pasar nasional sehingga bisa mengambil langkah yang tepat disaat terjadi gejolak harga.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Persandian untuk mengintensifkan penyampaian informasi terkait inflasi dan perkembangan terbaru harga komoditas dari hari ke hari, baik melalui videotron serta media cetak dan elektronik.
- d. TPID koordinasi dengan semua stakeholder terkait untuk memastikan agar selama Ramadhan hingga Idul Fitri, stok berbagai kebutuhan pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi dalam status aman.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan buat Surat Edaran Bupati tentang Penggunaan LPG Tabung 3 kg Bersubsidi Tepat Sasaran. Dengan demikian, penggunaan LPG 3 kg diharapkan bisa lebih tepat sasaran, salah satunya dengan melarang PNS menggunakan LPG 3 kg karena LPG ini merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin.
- f. Setiap bulan melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pimpinan perbankan untuk memantau perekonomian dan membahas sejumlah opsi guna tetap menggerakkan ekonomi di Banyuwangi.